

DIPLOMASI KOERSIF AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAN PASCA MUNDUR DARI *JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA)* TAHUN 2018

Nur Wahida¹, Asma Amin¹, Mu'min¹

^{1,2,3}Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Email Corespondensi: asmaamin.hi06@gmail.com

Abstrak

Diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran yang dilakukan melalui penerapan sanksi pasca mundur dari JCPOA. Kesepakatan nuklir Iran atau dikenal dengan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* adalah sebuah kesepakatan yang merupakan hasil dari perundingan diplomatik yang dilakukan oleh Negara P5+1 yang terdiri dari 5 Negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) seperti Amerika Serikat (AS), Rusia, Perancis, Inggris, China, Jerman serta Iran pada tahun 2015 yang ditujukan guna mengatasi polemik kepemilikan senjata nuklir Iran. Tidak puas dengan isi dari JCPOA, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump memutuskan untuk keluar secara sepihak dari perjanjian tersebut dan dengan segera menerapkan sanksi penuh kepada Iran. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA serta Apa hambatan dari diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui skripsi, jurnal dan berita terpercaya secara online maupun offline terkait dengan JCPOA. Hasil dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah adalah yang pertama mengenai pengaruh dari diplomasi koersif AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA, yang pada kenyataannya Amerika Serikat tidak memberikan pengaruh terhadap Iran atas kebijakannya pasca mundur dari JCPOA tahun 2018. Kedua mengenai hambatan diplomasi koersif AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA, yang dimana Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakannya mendapati hambatan disebabkan oleh tidak ada dukungan dari organisasi internasional terhadap tindakannya.

Kata kunci: Amerika Serikat, diplomasi koersif, Iran, JCPOA.

PENDAHULUAN

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) merupakan sebuah nama perjanjian nuklir Iran yang juga dikenal dengan sebutan Iran *Nuclear Deal*. Perjanjian yang disepakati oleh Iran ini beserta negara-negara Permanent Five (P5) +1 yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Rusia dan Tiongkok. JCPOA ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 2015 kemudian disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Juli 2015 dalam Resolusi 2231 (Abdillah: 2022).¹

Dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam suatu perjanjian, perlu adanya diplomasi sebagai salah satu alat terpenting dari kenegaraan bagi negara. Dalam

perkembangannya, Konsep baru yang berbeda telah muncul, ini terkait dengan diplomasi, dan salah satunya adalah diplomasi koersif yang dikembangkan oleh Alexander George. Strategi diplomasi koersif ini sudah banyak digunakan oleh negara-negara besar, salah satunya Amerika. Di mana Amerika menggunakan diplomasi koersif mengenai JCPOA terhadap Iran. Dalam berurusan dengan dinamika yang terjadi dalam suatu perjanjian, perlu untuk memiliki diplomasi sebagai salah satu alat terpenting dari *statecraft* bagi negara.²

JCPOA sendiri dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dan para pemimpin P5+1 lainnya. Mereka mengatakan JCPOA adalah cara paling efektif untuk meyakinkan Iran bahwa mereka tidak

¹ Davenport, Op.cit.

² Abdillah, M .F. (2022, 01 11). *Kebijakan AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA*. Diakses dari Jurnal UNIKOM:

[file:///C:/Users/Ny%20%2007/Downloads/UNIKOM Muhammad%20Fachri%20Abdillah Jurnal.pdf](file:///C:/Users/Ny%20%2007/Downloads/UNIKOM%20Muhammad%20Fachri%20Abdillah%20Jur%20nal.pdf). Diakses 11 Januari 2022. Pukul 20.00 WITA.

atau tidak dapat membangun senjata nuklir, bahwa semua opsi AS untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir tersedia tanpa batas waktu, dan bahwa AS akan melakukannya dengan berbagai cara untuk menghentikan program nuklir Iran. Perjanjian itu mencakup klausul sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, yang akan berlaku kembali jika Iran melanggar komitmennya. Setelah perjanjian JCPOA ditandatangani, sanksi dicabut, disetujui, dan IAEA ditugaskan untuk memeriksa semua fasilitas nuklir Iran.³

Setelah pemerintahan presiden Barack Obama digantikan oleh pemerintahan presiden Donald Trump, membawa kebijakan baru tentang masalah nuklir dan beberapa kritik dari Donald Trump mengenai perjanjian tersebut. Di antara pernyataan presiden Donald Trump tentang perjanjian JCPOA adalah kritik terhadap pemerintahan presiden Barack Obama sebelumnya, yang dianggap sangat kontras dengan kebijakan AS saat ini terhadap Iran selama pemerintahan sebelumnya. Kritiknya juga tidak terlepas dari Donald Trump bahwa Iran tersangka sponsor negara terorisme. Trump menyebut pemerintahan presiden Obama sebagai pemerintahan yang kurang berpikir panjang dalam membuat keputusan. Donald Trump sejak awal kampanye pemilihan presiden tidak memberikan dukungannya kepada JCPOA, sehingga menyebut JCPOA sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ada dalam kampanyenya dan berjanji untuk mengakhiri kesepakatan. Setelah menjabat selama 18 bulan sebagai presiden AS, sesuai dengan janjinya.⁴

Keputusan pemerintah AS untuk menarik diri dari kesepakatan itu menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, karena keluarnya AS dari kesepakatan itu menarik banyak kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah AS terhadap Iran. Tentu saja, kebijakan ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi Iran sendiri.

Alasan pemerintah AS untuk menarik diri dari JCPOA juga didasarkan pada masalah non-nuklir seperti rti, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga AS. Namun, sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap Iran memiliki banyak hambatan dan tantangan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sanksi sepihak tidak memiliki dukungan internasional dan ada perlawanan yang muncul dari Iran, didukung oleh struktur kekuatan domestik yang kuat dan ideologi politik yang menentang Amerika Serikat.

Inilah sebabnya mengapa kebijakan pemerintah AS seringkali tidak efektif dan sesuai dengan harapan Amerika Serikat sendiri. Keputusan pemerintah AS untuk menarik diri dari kesepakatan menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, karena kebijakan pemerintah AS malah meningkatkan tekad dan doktrin kemandirian terhadap Iran. Oleh karena itu, sanksi yang lebih kuat dan lebih kredibel (ekonomi dan keuangan) diperlukan terhadap Iran. Tidak hanya itu, tetapi juga membutuhkan berbagai faktor pendukung, termasuk peran dan dukungan komunitas internasional, aliran informasi yang efektif, kerja sama dengan aktor lain untuk menekan Iran, dan upaya negosiasi intensif dengan ancaman militer yang kredibel. Solusi lain untuk membuat sanksi lebih efektif adalah dengan menerapkan sanksi cerdas melalui penerapan sanksi yang menasar pembuat kebijakan Iran.⁵

TELAAH KONSEPTUAL

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan suatu kebijaksanaan dari negara satu ke negara lain, dengan tujuan untuk mencapai kepentingannya. Secara umum politik luar negeri adalah arah, nilai, sikap serta sasaran guna mempertahankan, menjaga keamanan

³ Loc.Cit

⁴ Rahim, M.H. (2019) *Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-À-Vis Iran*. Jurnal ICMES, Volume 3, hlm 29-45

⁵ Ibid

negara serta untuk memajukan kepentingan nasional.⁶

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah sikap atau upaya suatu negara dalam mengatasi dan memperoleh manfaat dari lingkungan eksternalnya. Menurutnya, kebijakan luar negeri bertujuan untuk merawat dan menjaga kelangsungan hidup suatu negara.⁷

Tujuan kebijakan luar negeri sering disebut sebagai citra kondisi suatu negara di masa depan, dimana pemerintah melalui penyusun kearifan nasional mampu memperluas pengaruhnya terhadap negara lain dengan maksud untuk mengubah sikap atau tindakan suatu negara lain. K.J. Holsti mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri menjadi tiga kriteria yaitu: Nilai atau *values* yang menjadi tujuan pengambil keputusan, Ada 3 periode waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta Bentuk klaim yang dibuat oleh satu negara terhadap negara lain.⁸

Penggunaan strategi yang menekankan pada kekuatan militer dan ekonomi sehingga suatu negara dimungkinkan mencapai tujuan politik luar negerinya. Salah satu contoh kasus dimana Amerika Serikat menggunakan strategi menekan ekonomi Iran dalam menghentikan kebijakan nuklir Iran. Sejak revolusi Islam yang terjadi di tahun 1979, Amerika Serikat mulai melakukan upaya-upaya koersif ke Iran. Namun pada tahap awal, ambisi nuklir Iran tidak mempunyai tujuan yang jelas yang kemudian menjadi kekhawatiran dari berbagai aktor internasional terkait proliferasi nuklir. Aktor internasional memperlihatkan kekhawatirannya pada saat Iran

mengumumkan akan mengejar proliferasi nuklir dikarenakan India yang berhasil melakukan tes ledakan hulu pertamanya pada tahun 1974, yang dimana memicu negara lain termasuk Iran dalam mengejar teknologi senjata nuklir dan merasa khawatir posisi strategisnya di kawasan tersebut bisa terancam.⁹

Tindakan Iran kemudian menuai tanggapan dari Amerika Serikat sebagai hegemon proliferasi nuklir. Amerika Serikat memiliki kekhawatiran tersendiri selain kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, jika Iran memiliki kekuatan untuk memproduksi nuklirnya, ketakutannya adalah jika rezim yang berkuasa pada saat itu jatuh, senjata dan kemampuan produksi nuklir akan dengan mudah jatuh ke tangan teroris. Jika rezim berikutnya memiliki kebijakan luar negeri yang cukup agresif, maka Iran bisa saja memulai perang nuklir. Amerika Serikat juga membatasi bantuan nuklirnya kepada Iran dalam mencegah Iran mendapatkan kemampuan senjata militer.¹⁰

Diplomasi Koersif

Diplomasi menurut Hedley Bull merupakan hubungan antar negara yang dilakukan oleh agen resmi yaitu pemerintah dengan tujuan perdamaian.¹¹ Diplomasi menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul "*The Principle of Diplomacy*"¹² bahwa diplomasi adalah seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.¹³ Pada dasarnya, diplomasi adalah upaya meyakinkan negara lain untuk memahami makna pandangan kita dan mendukung pandangan tersebut tanpa perlu menggunakan kekerasan.¹⁴

⁶ Hanrieder, W. F. (1971). *Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays*. New York: David McKay Co, hlm. 22.

⁷ Rosenau, Op. cit.

⁸ Ibid.

⁹ Astoundz (2022, 06 23). *Iran Nuclear Accord (JCPOA)*. Diakses dari WAC: <https://wachouston.org/student-resources/discussions/memberships-landing-page-10/?gclid=EAAlaQobChMlnovyz-jE-AIVZ5lmAh0XIQiEAAAYASAAEgJ-n-D-BwE>. Diakses 06 Juni 2022. Pukul 20.00 WITA.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Rijal, N.K. (2020). *Diplomasi, Keprotokolan, dan Praktik Sidang Internasional*. Malang: UMM, hlm. 2.

¹² Panikkar, K.M. (2001). *The Principle and Practice of Diplomacy*.

¹³ Roy, S.L. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

¹⁴ Djalal, H. (1990). *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*. Jakarta: CSIS, hlm. 30.

Diplomasi terbagi dua yaitu; *Soft Diplomacy*: diplomasi dengan bentuk penyelesaian perdamaian dalam bidang kebudayaan, bahasa dan ekonomi, *Hard Diplomacy*: diplomasi dalam bentuk perang, yaitu agresi militer dan politik.¹⁵ Cara yang digunakan dalam praktik diplomasi adalah persuasif, kompromi dan ancaman kekuatan senjata. Tujuan diplomasi untuk setiap negara adalah menjaga kepentingan nasional, kebebasan politik, dan integritas teritorial. Menurut Kautilya tujuan utama diplomasi adalah untuk menjamin keuntungan maksimum dari Negara sendiri, dan kepentingan utama tampaknya adalah pemeliharaan keamanan.¹⁶

Diplomasi sering juga disebut sebagai proses yang cenderung damai dan kooperatif, sementara koersif identik dengan paksaan, ancaman dan bahkan kekerasan oleh karena itu, diplomasi dan paksaan sering ditempatkan pada akhir spektrum yang berbeda karena mereka cukup kontradiktif. Namun dalam praktik konsepnya malah sebaliknya. Diplomasi koersif didefinisikan sebagai sebuah strategi politik luar negeri dimana suatu negara menggunakan upaya-upaya koersif tanpa menggunakan kekerasan atau kekuatan sepenuhnya dari suatu Negara.

Secara umum, diplomasi koersif dikenal sebagai pemaksaan yang dilakukan oleh suatu negara melalui ancaman, sanksi bahkan dalam bentuk kekerasan, dengan maksud mengubah sikap negara yang bersangkutan. Diplomasi koersif sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Alexander L. George pada tahun 1971 dalam bukunya yang berjudul "*The Limits of Coercive Diplomacy*" pada tahun 1971. Konsep diplomasi koersif adalah konsep yang berasal dari diplomasi kekerasan yang diperkenalkan oleh Thomas C. Schelling dalam bukunya "*Arms and Influence*" pada tahun 1966, terutama melalui konsep paksaan.

Compellence adalah strategi pemaksaan dengan bentuk ancaman yang dilakukan dengan kekerasan atau kekerasan secara terbatas namun efisien, guna meningkatkan kredibilitas ancaman itu sendiri. George kemudian mengembangkan sebuah kerangka konseptual baru yang lebih sistematis yakni diplomasi koersif yang merupakan elaborasi dari konsep *compellence*. George mengatakan, diplomasi koersif memiliki dua tujuan utama, yaitu menghentikan atau membatalkan tindakan berbahaya yang telah dilakukan oleh negara. Dalam penerapannya, strategi diplomasi koersif versi George melibatkan empat variabel yang terdiri dari permintaan, wadah atau mekanisme untuk menciptakan rasa urgensi terhadap permintaan seperti batas waktu, ancaman atau hukuman untuk ketidakpatuhan dan penggunaan insentif.

Tom Sauer menyatakan bahwa diplomasi koersif terdiri dari tiga variabel utama, yaitu, permintaan, ancaman dan tekanan waktu. Permintaan khusus terhadap lawan harus dirumuskan dengan tujuan menghentikan atau membalikkan tindakan yang telah dimulai lawan. Kedua, permintaan juga harus dicadangkan dengan ancaman yang eksplisit atau implisit. Ketiga, untuk meningkatkan kredibilitas ancaman, diperlukan tekanan waktu berupa deadline untuk kepatuhan.¹⁷

George juga menekankan bahwa strategi diplomasi murni tanpa adanya ancaman koersif akan lebih mungkin meningkat menjadi konflik bersenjata. Lebih luas lagi, George berpendapat bahwa membujuk seseorang untuk membatalkan apa yang mereka lakukan lebih sulit daripada membujuk seseorang untuk menghentikan apa yang telah mereka lakukan..¹⁸

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan teknik studi

¹⁵ Hadi, A. (2009). *Bahan Seminar: Politik Luar Negeri Indonesia: Prospek dan Tantangan dalam Era Globalisasi*. Dirjen IDP Departemen Luar Negeri RI, hlm. 8.

¹⁶ Yusuf, Op. cit.

¹⁷ Abdillah, M.F. (2022, 01 11). *Kebijakan AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA*. Diakses dari Jurnal UNIKOM:

[file:///C:/Users/Ny%20%2007/Downloads/UNIKOM Muhammad%20Fachri%20Abdillah Jurnal.pdf](file:///C:/Users/Ny%20%2007/Downloads/UNIKOM%20Muhammad%20Fachri%20Abdillah%20Jurnal.pdf). Diakses pada 11 Januari. Pukul 18.00 WITA.

¹⁸ George, A dalam Levy, J. S. (2008). *Deterrence and Coercive Diplomacy. The Contribution of Alexander George*. Jurnal Political Psychology, Volume 29, hlm 539.

pustaka yaitu dengan menelaah, membaca dan memahami buku, teori, opini dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian, serta data-data pendukung dari media internet maupun media cetak. Dengan teknik studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Iran dan dinamika hubungan kedua negara serta perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Teknik analisa data menggunakan metode triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundur dari JCPOA

Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump, yang percaya bahwa *Joint Comprehensive Plan of Action* atau sering disebut sebagai JCPOA, tidak secara efektif menekan Iran dalam pengembangan nuklirnya. Trump yakin Iran tidak transparan tentang kesepakatan nuklirnya.¹⁹ Donald Trump kemudian memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan seperti yang telah dijanjikan pada saat kampanyenya sebelum menjabat sebagai presiden AS, dan kemudian mengeluarkan sanksi terhadap Iran untuk membuat Iran kembali membahas masalah nuklirnya dengan AS dengan tujuan membentuk kesepakatan baru yang lebih komprehensif.²⁰

Keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari JCPOA berdampak serius terhadap dinamika hubungan AS dengan Iran. Amerika Serikat mengabaikan implikasi moral bahwa kepercayaan Iran terhadap pemerintah AS mengenai negosiasi dan kesepakatan dapat menurun. Ini karena Iran, yang telah diverifikasi oleh IAEA, telah mematuhi isi perjanjian yang ada. Kondisi penarikan AS dari JCPOA, yang dapat mempersulit Iran untuk

menaruh kepercayaannya pada AS, yang secara sepihak menarik diri dari JCPOA.²¹

Iran juga menilai sanksi yang dijatuhkan AS tidak masuk akal, karena hanya diberikan kepada Iran bukan dengan negara lain yang terindikasi sama dengan Iran. Seperti negara India, Israel, Korea Selatan dan Pakistan yang bahkan tidak termasuk dalam negara-negara penandatanganan NPT. Bahkan India dan Israel mendapatkan dukungan untuk mengembangkan nuklir mereka oleh Amerika Serikat.²²

Pada kenyataannya, bahkan sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran oleh Amerika Serikat memperburuk ekonomi Iran. itu tidak membuat Iran melindungi energi nuklirnya. Sebaliknya, Iran mengumumkan akan melampaui batas pengayaan uraniumnya. Ini juga divalidasi oleh IAEA dan menyatakan bahwa Iran telah melampaui aturan perjanjian.²³ Sikap Iran membuktikan bahwa Iran ingin mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan nuklir Iran, dan tampaknya sanksi Amerika terhadap Iran tidak ada pengaruhnya dalam hal mengurangi pengayaan nuklir Iran.²⁴ Tanggapan Iran terhadap sanksi tersebut menunjukkan efek dari serangkaian tindakan dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran. Diplomasi koersif sebagai instrumen kebijakan Iran tidak berpengaruh pada sikap Iran, yang dimana tidak mengubah perilaku Iran untuk mengikuti kehendak AS. Meskipun AS telah berhasil memperburuk ekonomi Iran sekalipun.²⁵

Kekuatan sanksi juga dipengaruhi oleh ada tidaknya dukungan dari publik terhadap sanksi tersebut, dan memang masyarakat internasional terus mendukung perjanjian JCPOA. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa JCPOA dapat mewakili kepentingan komunitas internasional terkait dengan masalah non-proliferasi nuklir.²⁶

¹⁹ Rahim, op. cit.

²⁰ Ibid.

²¹ Shafar, Op. cit.

²² Sauer, T. (2022, 05 06). *Coercive Diplomacy by the EU: The Iranian Nuclear Weapons Crisis.Third World Quarterly*. Diakses dari:

<https://doi.org/10.1080/01436590701200620>.

Diakses 06 Mei 2022. Pukul 15.00 WITA.

²³ Baiturohim, M, op. cit.

²⁴ Ibid.

²⁵ Abdillah, op. cit.

²⁶ Rahim, op. cit.

Hambatan dari Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundur dari JCPOA

Pada akhirnya, Amerika Serikat masih memilih untuk menjatuhkan sanksi sebagai opsi utama AS untuk menekan Iran terhadap kekuatan nuklirnya. Dengan begitu, Iran memiliki beberapa opsi untuk menanggapi tindakan AS, salah satunya adalah mematuhi JCPOA secara keseluruhan. Kepatuhan Iran terhadap JCPOA cukup menjanjikan untuk posisi Iran, karena jika Iran dibiarkan menarik diri dari JCPOA, itu hanya akan menyebabkan sanksi multilateral diterapkan kembali terhadapnya.²⁷

Setelah beberapa sanksi dijatuhkan terhadap Iran, Iran meminta bantuan Uni Eropa dengan melobi dalam bentuk ancaman. Iran mengeluarkan ultimatum yang dikenal sebagai ultimatum 60 hari pada 8 Mei 2019. Iran mengancam tidak akan mematuhi batas pengayaan uranium jika Eropa dalam waktu 60 hari gagal membantu ekonomi Iran, yang pada saat itu anjlok akibat sanksi AS. Tetapi Eropa menolak permintaan Iran dan akan meninjau komitmen Iran di dalam JCPOA dan NPT.²⁸

Iran juga terus meningkatkan pengayaan uranium selama Eropa tidak membantu ekonomi Iran. Pengayaan uranium Iran telah melampaui batas 3,67% yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengumumkan.²⁹ Kemanan manusia adalah untuk melindungi orang dan Negara.³⁰

Dua bulan setelah itu, Iran kembali menyatakan kepada Eropa bahwa mereka akan membuat langkah baru yang lebih berisiko. Terakhir, Iran juga memasang sentrifugal yang

lebih canggih, yakni 20 IR-6 dan 20 IR-4 untuk memperkaya uranium di Natanz. Di dalam JCPOA sendiri ditetapkan bahwa Iran hanya dapat memasang sentrifugal IR-1, model tertua dan paling tidak efisien.³¹ Tindakan Iran dalam menggunakan mesin sentrifugal yang lebih canggih ini dapat mempersingkat waktu pelarian yang dibutuhkan Iran dalam pengembangan senjata nuklirnya. Hal ini dikarenakan aktivitas IR-6 mencapai 10 kali lipat dibandingkan dengan sentrifugal generasi pertama yaitu IR-1.³²

Amerika Serikat juga tidak melewatkan fakta bahwa JCPOA adalah perjanjian yang diresmikan oleh Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi 2231, yang menyerukan kepada semua negara anggota PBB dan organisasi regional dan internasional untuk mendukung implementasi JCPOA.³³

Sehingga keputusan AS terbilang *illegitimate*, yang dianggap mengesampingkan DK PBB yang merupakan satu-satunya entitas internasional yang mempunyai kewenangan dalam menyetujui penggunaan kekuatan internasional dan pemberlakuan sanksi multilateral.³⁴ Bertentangnya keputusan AS dengan sikap resmi DK PBB, yang dimana kecil kemungkinan bagi AS untuk mendapatkan dukungan utama atau dukungan dari komunitas internasional.

Sanksi yang terus diterapkan Amerika Serikat kepada Iran, tidak lepas dari berbagai kendala karena sifat sanksi tersebut tidak mendapatkan dukungan internasional. Perlawanan yang konsisten dari Iran didukung oleh struktur kekuasaan domestik dan ideologi politik yang kuat dalam menentang Amerika Serikat. Hal ini kemudian membuat sanksi AS

²⁷ European Parliamentary Research Service. (2022, 06 07). *Future of the Iran Nuclear Deal: How Much can US Pressure Isolate Iran?*. Diakses dari: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI\(2018\)6218_97_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)6218_97_EN.pdf). Diakses 07 Juni 2022. Pukul 20.00 WITA.

²⁸ Tehran. (2022, 06 10). *EU rejects Iran's 60-day ultimatum on JCPOA*. Diakses dari MNA: <https://en.mehrnews.com/news/145062/EU-rejects-Iran-s-60-day-ultimatum-on-JCPOA>. Diakses 10 Juni 2022. Pukul 22.00 WITA.

²⁹ Abdillah, op. cit.

³⁰ Abbas, W. (2018). *Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

³¹ BBC. (2022, 06 11). *Iran nuclear deal: Tehran to develop centrifuges for uranium enrichment*. Diakses dari: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49586508>. Diakses 11 Juni 2022. Pukul 23.15 WITA.

³² Primer, Op.cit ; BBC, Op.cit.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

tidak efektif dalam menekan Iran sesuai dengan tujuan AS.³⁵

Secara keseluruhan Amerika Serikat belum mendapatkan dukungan internasional dalam pemberlakuan sanksinya terhadap Iran, secara politik maupun praktik. Hal tersebutlah yang menghambat tindakan Amerika tersebut kepada Iran.³⁶

KESIMPULAN

Kondisi keluarnya AS dari JCPOA dapat mempersulit Iran untuk menaruh kepercayaannya pada Amerika Serikat, yang secara sepihak menarik diri dari JCPOA. Pada kenyataannya bahkan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat memperburuk ekonomi Iran. itu tidak membuat Iran melindungi energi nuklirnya. Sebaliknya Iran menyatakan akan melewati batas pengayaan uraniumnya. Ini juga divalidasi oleh IAEA dan mengatakan Iran telah melampaui aturan kesepakatan. Sikap Iran menunjukkan bahwa Iran ingin mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan nuklir Iran, dan tampaknya sanksi AS terhadap Iran tidak memiliki pengaruh dalam hal melindungi pengayaan nuklir Iran. Tanggapan Iran terhadap sanksi tersebut menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan berupa sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran. Diplomasi koersif, sebagai alat kebijakan Iran, tidak berdampak pada posisi Iran, dan itu tidak mengubah perilaku Iran sesuai dengan kehendak Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat telah berhasil memperburuk ekonomi Iran.

Sanksi yang terus diterapkan Amerika Serikat kepada Iran tidak lepas dari berbagai kendala karena sifat sanksi tersebut tidak mendapat dukungan internasional. Perlawanan konstan Iran didukung oleh struktur kekuatan nasional dan ideologi politik yang kuat untuk menentang Amerika Serikat. Hal ini membuat sanksi tidak efektif dalam menekan Iran sesuai dengan tujuan AS. Secara keseluruhan, Amerika Serikat tidak menerima dukungan internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran, secara politik atau

praktis. Itulah yang menghambat tindakan AS terhadap Iran.

REFERENSI

Abbas, W. (2018). *Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Abdillah, M. F. (2019). *Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundurnya Amerika Serikat Dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. Skripsi Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Abdillah, M.F. (2022, 01 11). *Kebijakan AS terhadap Iran pasca mundur dari JCPOA*. Diakses dari Jurnal UNIKOM: [file:///C:/Users/Ny%20%2007/Downloads/UNIKOM Muhammad%20Fachri%20Abdillah Jurnal.pdf](file:///C:/Users/Ny%20%2007/Downloads/UNIKOM%20Muhammad%20Fachri%20Abdillah%20Jurnal.pdf).

Afrizal (2021). *Strategi Iran Pasca Amerika Serikat Keluar Dari Perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action Tahun (2018-2020)*. Jurnal JOM FISIP, Volume 8, 5-6.

Ajili, H. & Rouhi, M. (2022, 06 07) *Iran's Military Strategy*. Diakses dari IISS: <https://www.iiss.org/publications/survival/2019/survival-global-politics-and-strategy-december-2019january-2020/616-11-ajili-and-rouhi>.

Alviansyah, M. F. (2021). *Eskalasi Konflik Pasca Kemunduran Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action*. Skripsi Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher.

Astoundz (2022, 06 23). *Iran Nuclear Accord (JCPOA)*. Diakses dari WAC:

³⁵ Rahim, Op. cit.

³⁶ BBC, Op. cit

- <https://wachouston.org/student-resources/discussions/memberships-landing-page-10/?gclid=EAlalQobChMlnovyz-jE-AIVZ5lmAh0XIQiEAAYASAAEgJ-n-D-BwE>.
- Baiturohim, M. (2021). *Implikasi Penarikan Diri Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. Jurnal Dauliyah, Volume 6, 284-285.
- Bakhash, S. (2022, 10 06). *The U.S. and Iran in Historical Perspective*. Diakses dari: <https://www.fpri.org/article/2009/09/the-u-s-and-iran-in-historical-perspective>.
- Baylis, J & Smith, S. (2001). *The Globalization of World Politics, the 3th edition: an introduction to international Relations*. New York: Oxford University Press.
- BBC, "Dunia menyambut baik kesepakatan nuklir Iran", dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150714_dunia_iran_nuklir_reaksi
- BBC. (2022, 06 10). *Six charts that show how hard US sanctions have hit Iran*. Diakses dari: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109>.
- BBC. (2022, 06 11). *Iran nuclear deal: Tehran to develop centrifuges for uranium enrichment*. Diakses dari: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49586508>
- Beuchamp, Z. (2022, 03 26). *Trump's Withdrawal from the Iran Nuclear Deal, Explained*. Diakses dari Vox: <https://www.vox.com/world/2018/5/8/17328520/iran-nuclear-deal-trump-withdraw>.
- Bruxelles. (2022, 03 26). *Joint Statement on the Reimposition of US Sanctions Due to its Withdrawal from the JCPOA*. Diakses dari European Union: https://eeas.europa.eu/headquarters-homepage/49141/joint-statement-re-imposition-us-sanction-due-its-withdrawal-joint-comprehensive-plan-of-action_en.
- Burr, W. (2009). *A Brief Story of U.S.-Iranian Nuclear Negotiation*. Jurnal Sage, Volume 1, hlm 21.
- CNN. (2022, 06 22). *10 Fakta Mengenai Nuklir Iran*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915-120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-iran/>.
- Council, S. (2022, 03 26). "Adopting Resolution 2231 (2015), Endorses Joint Comprehensive Agreement on Iran's Nuclear Programme". Diakses dari United Nations
- Davenport, K. (2022, 01 11). *The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at the Glance*. Diakses dari Arms Control Association: armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance.
- Davenport, K. (2022, 03 26). *The P5+1 and Iran Nuclear Deal Alert*. Diakses dari Arms Control: <https://www.armscontrol.org/blog/2018-04-25/p51-iran->
- Djalal, H. (1990). *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*. Jakarta: CSIS.
- European Parliamentary Research Service. (2022, 06 07). *Future of the Iran Nuclear Deal: How Much can US Pressure Isolate Iran?*. Diakses dari: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI\(2018\)621897_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621897/EPRS_BRI(2018)621897_EN.pdf).
- Federation of American Scientists. (2022, 03 26). *NSPM-11: Ceasing United States Participation in the Joint Comprehensive Plan of Action*. Diakses dari Fas: <https://fas.org/irp/offdocs/nspm/nspm-11.pdf>.
- George, A dalam Levy, J. S. (2008). *Deterrence and Coercive Diplomacy. The Contribution*

- of Alexander George. *Jurnal Political Psychology*, Volume 29, 539.
- George. (2022, 06 23). *When Coersion Backfires: The Limits of Coercive Diplomacy in Iran*. Diakses dari: <https://www.cissm.umd.edu/sites/default/files/When%20Coercion%20Backfires%20-%20Mohseni%20Dissertation.pdf>.
- Hadi, A. (2009). *Bahan Seminar: Politik Luar Negeri Indonesia: Prospek dan Tantangan dalam Era Globalisasi*. Dirjen IDP Departemen Luar Negeri RI.
- Hanrieder, W. F. (1971). *Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays*. New York: David McKay Co, hlm. 22.
- Hayati, R. (2022,01 11). *Artikel pengertian penelitian deskriptif, macam, ciri, dan cara menulisnya*. Diakses melalui: <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deskriptif/>.
- Jones, R. W. (1998). *Tracking Nuclear Proliferation: A Guide in Maps and Charts*. Washington DC : Carnegie Endowment for International Peace, hlm. 1.
- Juanita, M. D. (2017). *Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2015*. Skripsi Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kerr, P.K. & Katzman, K. (2022, 06 10). *Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit*. Diakses dari CRS: <https://sgp.fas.org/crs/nuke/R43333.pdf>.
- Kurniadi, A. (2016). *Kesepakatan Amerika Serikat Menyetujui Joint Plan Of Action (JPOA) Dengan Iran Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran 2015*. Skripsi Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Larasati, M. S. (2021). *Kebijakan Pemerintah Iran dalam Merespon Dibataalkannya Perjanjian JCPOA*. *Jurnal Balkon*, Volume 5, 67-75.
- Levs, J. (2022, 06 10). *A summary of sanctions against Iran*. Diakses dari CNN: <https://edition.cnn.com/2012/01/23/world/meast/iran-sanctions-facts/index.html>.
- Liputan 06. (2022, 06 22). *IAEA Sepakat Melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB*. Diakses dalam: <http://global.liputan6.com/read/117095/iaea-sepakat-melaporkan-iran-ke-dewan-keamanan-pbb>.
- Manik. (2015) *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publisher.
- Marcus, J. (2022, 06 07). *Is the United States heading for war with Iran?*. Diakses dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east48298517>.
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3S.
- Mikail, K . (2018). *Perjanjian Nuklir Iran dan Kepentingan AS-Israel di Timur Tengah*. *Jurnal ICMES*, Volume 2, 73.
- Mousavian, S. H. & Mousavian, M. M. (2018). *Building on the Iran Nuclear Deal for International Peace and Security*. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, Volume 1, 174.
- Panikkar, K.M. (2001). *The Principle and Practice of Diplomacy*.
- Paramasatya, S. & Wiranto, S. (2019). *Konfrontasi Amerika Serikat dan iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. *Jurnal Hubungan Inernasional*, Volume 12, 301.
- Plano, J. C. & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Primer, T. I. (2022, 06 11). *Iran Breaches of the Nuclear Deal*. Diakses dari: <https://iranprimer.usip.org/blog/2019/oct/02/iran%E2%80%99s-breaches-nuclear-deal>.

- Rahim, M. H. (2019). *Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-À-Vis Iran*. Jurnal ICMES, Volume 3, 29-45. <https://doi.org/10.1080/01436590701200620>.
- Rahim, M. H. (2019). *Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-À-Vis Iran*. Jurnal ICMES, Volume 3, 36-37.
- Rahim, M. H. (2019). *Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-À-Vis Iran*. Jurnal ICMES, Volume 3, 41.
- Rijal, N.K. (2020). *Diplomasi, Keprotokolan, dan Praktik Sidang Internasional*. Malang; Program Studi HI UMM.
- Rosenau, J. M & dkk. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Rosenau, J. M. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Rouhi, M. (2022, 06 07). *Will Iran's patience on nuclear deal pay off?*. Diakses dari IISS: <https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/11/iran-patience>
- Roy, S.L (1995). *Diplomasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Russet, B & Starr, H. (1988). *World Politics: The Menu for Choice. 2 nd ed*. New York: W.H. Freeman and Co.
- Sagala, F. P dkk. (2003). *Model Atom dan Prospeknya sebagai Energi Masa Depan*. Jakarta: Pusat Diseminasi Iptek Nuklir BATAN. Hlm, 13-17.
- Sandu, S. & Sodik, M.A (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Saputra, I. (2019). *Keputusan Uni Eropa Mempertahankan Perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dengan Iran Tahun 2018*. Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sauer, T. (2022, 05 06). *Coercive Diplomacy by the EU: The Iranian Nuclear Weapons Crisis*. *Third World Quarterly*. Diakses dari: <https://doi.org/10.1080/01436590701200620>.
- Service, C. R. (2022 06 11). *Iran: Efforts to Preserve Economic Benefits of the Nuclear Deal*. Diakses dari: <https://sgp.fas.org/crs/nuke/IF10916.pdf>
- Shafar, W. I. & Mutmainnah, D. (2020). *Resistensi Hubungan Luar Negeri AS dan Iran: Studi Kasus JCPOA*. Jurnal Transformasi Global, Volume 7, 145.
- Subagyo, A. (2022, 01 11). *Teori Hubungan Internasional: Teori-teori National Interest*. Diakses dari <https://agussubagyo1978.files.wordpress.com/2015/02/presentasi-teori-teori-national-interest-20111.pdf>.
- Tehran. (2022, 06 10). *EU rejects Iran's 60-day ultimatum on JCPOA*. Diakses dari MNA: <https://en.mehrnews.com/news/145062/EU-rejects-Iran-s-60-day-ultimatum-on-JCPOA>.
- United Nation (2022, 06 22). *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)*. Diakses dari: <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>.
- Yusuf, S. (1989). *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.